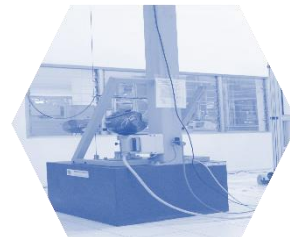




Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA TAHUN 2026 BBSPJIKKP



KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi target kinerja yang diharapkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dan disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki tujuan untuk membangun manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dokumen Rencana Kinerja 2026 disusun pada awal tahun sebelum tahun anggaran berjalan untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Kami berharap agar Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2026 ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) pada tahun anggaran 2026 dan dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, Januari 2025

Kepala,



Hagung Eko Pawoko

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Ruang Lingkup	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6
A. Hasil-Hasil Pembangunan	6
B. Arah Pembangunan	9
BAB III RENCANA KINERJA	12
A. Sasaran	12
B. Indikator Kinerja	21
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	
A. Formulir Rencana Kinerja 2026	
B. Matriks Keterkaitan Aktivitas Utama dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	
C. Matris Kinerja dan Pendanaan BBSPJIKKP TA 2026	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Peningkatan Kapabilitas Hasil Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri TA 2019-2024.....	6
Tabel 2.2 Rincian Kegiatan Kolaborasi BBSPJIKKP TA 2019-2024.....	7
Tabel 2.3 Hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi BBSPJIKKP TA 2019-2024.....	8
Tabel 2.4 Perbandingan Capaian Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri Yang Memanfaatkan Produk Inovasi/Paten Hasil Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi TA 2019-2021.....	9
Tabel 2.5 Perkembangan Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Yang Telah Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi DAPATI TA 2022-2024.....	9
Tabel 2.6 Rincian Kegiatan DAPATI TA 2022-2024	10
Tabel 2.7 Realisasi PNBP BBSPJIKKP TA 2020-2024	11
Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan TA 2020 – 2024	11
Tabel 2.9 Volume Layanan Jasa BBSPJIKKP Tahun 2020-2024	12
Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung.....	19
Tabel 3.2 Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran	22
Tabel 3.3 Rencana Kegiatan dan Anggaran BBSPJIKKP TA 2026.....	26
Tabel 3.4 Perjanjian Kinerja TA 2026	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance), maka suatu organisasi pemerintahan wajib menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung penerapan asas tersebut, maka diperlukan perencanaan program kerja yang tepat dan terencana sehingga kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Presiden mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategis yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan. Renstra organisasi kemudian diturunkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian diaplikasikan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2026. Rencana Kinerja merupakan sebuah janji komitmen suatu instansi yang akan dicapai dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja ini berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja TA 2026 adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BBSPJIKKP
2. Sebagai kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan BBSPJIKKP pada tahun 2026
3. Memudahkan dalam menilai keberhasilan/kegagalan atas target kinerja yang telah ditetapkan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

• Dasar Hukum Tupoksi

1. Permenperin No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI

• Tugas Pokok

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, BBSPJIKKP mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi :

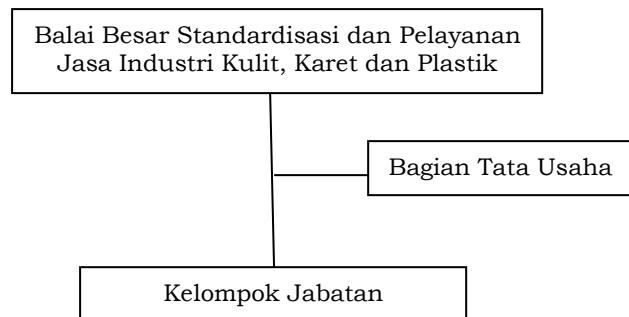
- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, struktur organisasi BBSPJIKKP terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BBSPJIKKP ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBSPJIKKP

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Adapun kelompok jabatan fungsional di BBSPJIKKP antara lain Penguji Mutu Barang (PMB), Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), Pembina Industri (PI), Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Anggaran, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Analis Kepegawaian, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Arsiparis yang mendukung tugas dan fungsi BBSPJIKKP.

E. Ruang Lingkup

Batasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja TA 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja ini disusun untuk Tahun Anggaran 2026
2. Unit-unit yang termasuk dalam Renkin BBSPJIKKP Tahun 2025 adalah Bagian dan fungsi-fungsi di lingkungan BBSPJIKKP.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-Hasil Pembangunan

Tugas pokok BBSPJIKKP adalah melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, BBSPJIKKP memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kajian-kajian di bidang kulit, karet dan plastik. Berdasarkan tupoksi BBSPJIKKP, maka secara umum hasil dari pelaksanaan kegiatan di BBSPJIKKP adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi Industri

Kementerian Perindustrian memberikan tugas kepada BBSPJIKKP untuk melaksanakan penyusunan rekomendasi, penerapan dan pengawasan standardisasi industri. Kegiatan penyusunan rekomendasi berupa penyiapan konsep/Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), baik berupa konsep baru maupun revisi. Selain itu BBSPJIKKP juga berperan aktif dan menjadi anggota komite teknis dalam pembahasan konsep RSNI bidang kimia dan kemasan yang disusun/direvisi dan dalam diskusi pembahasan petunjuk teknis pemberlakuan SNI wajib. Untuk menunjang penerapan standardisasi, BBSPJIKKP Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dan laboratorium pengujian untuk memastikan SNI diterapkan dalam industri. BBSPJIKKP juga melakukan pengawasan standardisasi terhadap industri baik dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang berlaku. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

2. Pemanfaatan Teknologi Industri dan Industri 4.0

a. Kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Kolaborasi merupakan faktor utama untuk membentuk ekosistem inovasi dalam pemecahan masalah dalam industri. BBSPJIKKP selalu berupaya untuk mendorong ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, diantaranya melibatkan pihak pemerintah (termasuk balai/pusat lain di Kemenperin), akademisi, dan/atau pelaku industri. Perkembangan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri selama TA 2021-2023 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 2.1. Perkembangan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri TA 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	2 kegiatan kolaborasi	2 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi	2 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi

Pada tahun 2019 terdapat 2 kegiatan kolaborasi berupa problem solving yaitu Pemanfaatan teknologi penentuan umur simpan (masa kadaluarsa) Resiprene-35 dan teknologi peningkatan kecerahan Resiprene-35 kolaborasi dengan PT. Industri Karet Nusantara (IKN), dan penggunaan kajian dan rekomendasi terkait pemanfaatan Ruang Eks Pengering BrCr di Kebun Merbuh untuk Peternakan Ayam Closed House dikaitkan dengan Sistem Manajemen Lingkungan kolaborasi dengan PTPN IX. Pada tahun 2020 terdapat 2 kegiatan kolaborasi berupa problem solving yaitu Pembuatan Prototype Rubber Dumper Jok Mobil untuk Difabel kolaborasi dengan PT. YPTI dan Penanganan limbah cair kolaborasi dengan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan. Pada tahun 2021 terdapat 1 kegiatan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kepulauan Sula terkait Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor.

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kegiatan kolaborasi dengan PT YPTI terkait Pembuatan Rubber Dumper Jok Mobil Untuk Difabel.

Pada tahun 2023 terdapat kegiatan kolaborasi antara BBSPJIKKP, CV Northy dan UII dengan judul kegiatan Penguatan industri melalui optimalisasi teknologi di IKM CV Northy dan kolaborasi antara BBSPJIKKP, PT Inastek dan ATMI Solo dengan judul kegiatan Pengembangan Produk Rubber Anti Vibration Sebagai Komponen Antropometer Untuk Pendeteksi Stunting.

Pada tahun 2024 terdapat kegiatan kolaborasi antara BBSPJIKKP, IKM Roosman Leather dan Isi Yogyakarta dengan judul kegiatan “Pemanfaatan Paket Teknologi/Konsultasi pada IKM Roosman”.

Rincian kegiatan kolaborasi Tahun 2019-2024 ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2.2. Rincian Kegiatan Kolaborasi BBSPJIKKP TA 2019-2024

No	Tahun	Kolaborasi	Judul Kegiatan
1	2019	PT. Industri Karet Nusantara (IKN)	Pemanfaatan teknologi penentuan umur simpan (masa kadaluarsa) Resiprene-35 dan teknologi peningkatan kecerahan Resiprene-35
2	2019	PTPN IX	Penggunaan kajian dan rekomendasi terkait pemanfaatan Ruang Eks Pengering BrCr di Kebun Merbuh untuk Peternakan Ayam Closed House dikaitkan dengan Sistem Manajemen Lingkungan
3	2020	PT. YPTI	Pembuatan Prototype Rubber Dumper Jok Mobil untuk Difabel kolaborasi
4	2020	UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan	Penanganan limbah cair kolaborasi
5	2021	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula	Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor

No	Tahun	Kolaborasi	Judul Kegiatan
6	2022	PT. YPTI	Pembuatan Rubber Dumper Jok Mobil Untuk Difabel
7	2023	CV Northy dan UII	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy
8	2023	PT Inastek dan ATMI Solo	Pengembangan Produk Rubber Anti Vibration sebagai Komponen Antropometer untuk Pendeteksi Stunting
9	2024	IKM Roosman Leather dan Isi Yogyakarta	Pemanfaatan Paket Teknologi/ Konsultasi pada IKM Roosman Leather

b. Pemanfaatan teknologi industri dalam rangka pengembangan industri

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. BBSPJIKKP menyediakan jasa konsultasi pemanfaatan teknologi melalui penerapan hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri. Pada tahun 2019-2024, hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi BBSPJIKKP ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 2.3. Hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi BBSPJIKKP TA 2019-2024

No	Tahun	Judul Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Nama Perusahaan Industri/Badan Usaha yang Menerapkan
1	2019	Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing sebagai Kompos	PT Usaha Loka
2	2019	Teknologi Chrome Revoverly	PT Adi Satria Abadi
3	2020	Implementasi Mesin Pengikis Mutiara Kulit Ikan Pari	Zazmi Leather
4	2020	Penerapan Alat Chrome Recovery	PT. Adi Satria Abadi
5	2021	Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula
6	2022	Pembuatan Rubber Dumper Jok Mobil Untuk Difabel	PT. YPTI
7	2023	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy	CV Northy dan UII
8	2023	Pengembangan Produk Rubber Anti Vibration sebagai Komponen Antropometer untuk Pendeteksi Stunting	PT Inastek dan ATMI Solo
9	2024	-	-

Tabel 2.4. Perbandingan capaian peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi TA 2019-2021

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi BBSPJIKKP	99,7%	30,5%	-

c. Pemanfaatan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI

BBSPJIKKP menyediakan jasa konsultasi melalui pelaksanaan Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) sebagai sarana dalam meningkatkan kapabilitas sektor IKM. Perkembangan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI selama TA 2022-2024, ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perkembangan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI TA 2022-2024

Indikator Kinerja	2022	2023	2024
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	61,12%	45,84%	24,55%

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) industri yang mendapatkan layanan jasa konsultasi DAPATI yaitu IKM Djoen Leather dan PT Yutaka Asia Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) industri yang mendapatkan layanan jasa konsultasi DAPATI yaitu CV PSM dan UD Berkah. Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) industri yang mendapatkan layanan jasa konsultasi DAPATI yaitu Pheryno Leather. Rincian kegiatan DAPATI Tahun 2022-2024 ditampilkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Rincian Kegiatan DAPATI TA 2022-2023

No	Tahun	Perusahaan/Industri	Judul Kegiatan	Efisiensi
1	2022	IKM Djoen Leather	Perancangan Desain Layout Area Produksi Dan Showroom	5,57%
2	2022	PT Yutaka Asia Indonesia	Pemanfaatan Limbah Sarung Tangan Karet menjadi Produk Karet Lembaran	116,67%

3	2023	CV PSM	Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi	83,55%
4	2023	UD Berkah	Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit	8,13%
5	2024	Pheryno Leather	Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah	24,55%

3. Layanan Jasa Teknis Industri

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BBSPJIKKP memberikan layanan jasa teknis kepada masyarakat dan industri. Hasil dari layanan yang diberikan ini akan menghasilkan penerimaan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama 5 tahun terakhir jumlah penerimaan BBSPJIKKP selalu mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 (Tabel 2.7).

Tabel 2.7. Realisasi PNBP BBSPJIKKP TA 2020-2024

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Litbang	14.968.807	0	0	0	0
Pendampingan	293.365.000	236.895.000	464.234.000	747.439.000	1.528.325.000
Pengujian	412.414.755	410.822.744	750.832.150	830.319.000	1.097.953.700
Kalibrasi	110.215.000	97.611.000	168.513.200	229.943.000	371.067.980
Uji Profisiensi	-	-	-	95.495.000	159.600.000
Inspeksi	-	-	-	153.033.000	404.766.000
Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (VV GRK)	-	-	-	15.750.000	213.900.000
Sertifikasi	1.976.682.000	2.776.422.000	2.624.100.000	2.443.596.000	3.175.849.200
Pemeriksa Halal				983.050.000	777.177.857
Sertifikasi Profesi					565.200.000

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Audit Teknologi				25.000.000	249.842.100
Konsultasi	-	24.900.000	-	135.460.000	1.126.403.800
Miniplant Kulit	-	-	-	178.420.828	78.376.292
Miniplant Karet	-	-	-	117.783.118	36.821.750
Jasa Lainnya	31.344.725	38.192.359	228.539.807	10.195.000	220.912.515
Pemanfaatan Aset					0
Jumlah	2.838.990.287	3.774.264.959	4.207.051.331	5.965.483.946	10.050.681.444
Target	6.041.000.000	6.500.000.000	5.000.000.000	5.568.042.000	6.869.712.000
Pertumbuhan PNB	-45,28%	32,94%	11,47%	41,80%	68,48%

Perkembangan jumlah pelanggan BBSPJIKKP dan jumlah volume layanan selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9.

Tabel 2.8. Jumlah Pelanggan TA 2020-2024

Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Sertifikasi	89	113	79	119	110
Pemeriksa Halal	0	0	14	426	9
LVV GRK	0	0	1	1	5
Verifikasi TKDN	0	0	0	0	0
Kalibrasi	49	48	52	85	95
Pengujian	303	199	204	175	165
Pelatihan	28	17	15	40	67
Uji Profisiensi	0	0	32	51	52
Inspeksi Teknis	0	0	1	9	7
Miniplant karet	2	2	2	9	7
Miniplant kulit	60	60	70	101	69
Konsultasi	2	2	5	4	10
Audit Teknologi	0	0	0	0	0
Jumlah	533	441	475	614	612

Tabel 2.9. Volume Layanan Jasa BBSPJIKKP Tahun 2020-2024

Jenis layanan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Litbang	MoU	1	-	-	-	-
2. Pendampingan (pelatihan)	Orang peserta	769	879	254	464	920
3. Pengujian	Contoh/Sampel	1.359	1.566	1.750	2311	2.588
4. Konsultansi	Jumlah konsultansi	2	2	5	4	32
5. Kalibrasi	Alat	543	373	586	837	1.065
6. Sertifikasi						
a) Sistem Manajemen Mutu	Pelanggan/ industry	99	97	106	102	61
b) SPPT SNI	Pelanggan/ industry	122	119	104	80	86
c) Sistem Manajemen Lingkungan	Pelanggan/ industry	42	45	48	50	29
d) SMK3	Pelanggan/ industry	1	7	8	11	16
e) Industri Hijau	Pelanggan/ industry	1	-	5	5	8
f) Halal	Pelanggan/pelaku usaha	-	-	14	426	104
7. Miniplant kulit	Pelanggan/ industry	-	-	-	101	120
8. Miniplant karet	Pelanggan/ industry	-	-	-	9	30
9. Uji Profisiensi	Pelanggan/ industry	-	-	8	51	67
10. Inspeksi	Pelanggan/ industry	-	-	1	9	30
11. Validasi Verifikasi GRK dan TKDN	Pelanggan/ industry	-	-	1	1	2
12. Audit Teknologi	Pelanggan/industry	1	-	-	0	0
13. Jasa Lainnya	Kegiatan	142	107	85	24	4

B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan

praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada

keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *net* ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

- a. Perbaikan alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d. Perbaikan desain zona industri nasional; dan
- e. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan Teknologi

- a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b. Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d. Pengembangan standardisasi industri dan industri hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) BBSPJIKKP yang disusun ini menyajikan indikator-indikator kinerja sasaran maupun kegiatan. Pada saat penyusunan, indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang dianggap terbaik. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman serta referensi-referensi tambahan, indikator-indikator yang tidak sesuai nantinya akan mengalami perubahan.

Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renkin diambil dari dokumen Renstra. Pada saat penyusunan Renstra, sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran yang dianggap terbaik. Namun demikian, seperti juga pada indikator kinerja, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengakibatkan sasaran-sasaran yang ditetapkan menjadi kurang tepat dan perlu disempurnakan. Sasaran-sasaran tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam kaitannya dengan tujuan masing-masing. Namun, sebagian sasaran berorientasi pada output dan lebih bersifat kegiatan.

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2026 beserta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	- Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
	2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	- Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
SK2. Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	- Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
	2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	- Diseminasi - Pameran
SK3. Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	- Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi - Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi - Jasa pelayanan sertifikasi profesi - Jasa pelayanan audit teknologi - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri - Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen - Jasa pelayanan inspeksi teknis - Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Jasa Pelayanan Uji Profisiensi - Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal - Miniplant karet - Miniplant kulit

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
	2. Jumlah hasil layanan jasa industri	- Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji - Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis - Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profesiensi - Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal
	3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan
	4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	- Gaji dan tunjangan
SK4. Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
SK5. Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	- Pengelolaan data dan informasi
	2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- Pengelolaan data dan informasi
	3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	- Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/ layanan - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
KS6. Tercapainya pengawasan	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal	- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
internal yang efektif dan efisien	telah ditindaklanjuti oleh Satker	SPIP
	2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	- Pengelolaan Kearsipan
SK7. Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	- Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
SK8. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	- Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/ layanan - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran - Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan

Pencapaian sasaran dari setiap program sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama pelaksanaan program berjalan. Untuk pencapaian sasaran secara optimal diperlukan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari suatu program yang baik.

BBSPJIKKP mempunyai rencana sasaran sebanyak 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024, agar keempat sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal maka diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang baik. Untuk setiap sasaran diidentifikasi resiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut, dan dilakukan antisipasi untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Berikut ini identifikasi resiko dan antisipasi untuk mengatasinya :

Tabel 3.2. Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Resiko	Antisipasi
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*		
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	- Keterlambatan layanan jasa - Ketidakpuasan pelanggan	- Pelaksanaan layanan jasa sesuai SPM - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
SK.2	Terwujudnya	1	Persentase	Adanya pesaing	- Menjaga dan

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Resiko	Antisipasi
	layanan jasa industri yang mandiri		peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	pada layanan jasa teknis yang sama	meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri		- Berusaha menambah sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Adanya aset-aset idle yang membebani biaya operasional	Penghapusan alat yang sudah rusak berat
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Biaya operasional meningkat	Perencanaan anggaran dilaksanakan dengan seksama
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	- Rendahnya motivasi SDM untuk meningkatkan kompetensinya - Rendahnya nilai disiplin pegawai	- Memotivasi SDM dan mengadakan pelatihan teknis internal - Memberi reward untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin tinggi dan memberi punishment untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin rendah

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Resiko	Antisipasi
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Menurunnya kualitas aplikasi pelayanan berbasis elektronik	Evaluasi penggunaan aplikasi pelayanan berbasis elektronik
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah	Temuan internal belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Resiko	Antisipasi
	efektif dan efisien		ditindaklanjuti oleh Satker		
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Temuan hasil pengawasan kearsipan belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan kearsipan
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Kurang lengkapnya dokumen pendukung yang memenuhi standar dalam penilaian SAKIP	Melengkapi dokumen pendukung untuk memenuhi standar penilaian SAKIP
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Rendahnya nilai IKPA bulanan	Memastikan pelaksanaan anggaran mengikuti perencanaan anggaran yang telah ditetapkan
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Penggunaan produk dalam negeri rendah	Meminimalisir penggunaan produk luar negeri

Dalam pencapaian sasaran program, BBSPJIKKP melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Renstra BBSPJIKKP Tahun 2025 - 2029.

Kegiatan-kegiatan tersebut rencananya dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 28.379.646.000.

Kegiatan-kegiatan BBSPJIKKP dikelompokkan dalam 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (EC) dan Program Dukungan Manajemen (WA) dengan jumlah anggaran disesuaikan jika ada perubahan Pagu yang diberikan oleh BSKJI.

Adapun rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun 2026 sebagai komponen pada output dan sub output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Kegiatan dan Anggaran BBSPJIKKP TA 2026

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		5.220.609.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		
AEC	Kerja sama		25.431.000
003	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		25.431.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		190.000.000
005	Promosi/publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/ Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		190.000.000

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri		3.583.856.000
007	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Kulit, Karet dan Plastik		571.393.000
015	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Kulit, Karet dan Plastik		294.000.000
027	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Kulit, Karet dan Plastik		1.308.147.000
039	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		375.000.000
044	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri Industri Kulit, Karet dan Plastik		100.000.000
085	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		110.000.000
	Jasa Pelayanan Audit Teknologi		40.000.000
088	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik		111.265.000
090	Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan		126.566.000
CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan		1.421.322.000
006	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan BBSPJIKKP		1.421.322.000
WA	Program Dukungan Manajemen		23.159.037.000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri		23.159.037.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		22.480.137.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat		50.000.000
	051	Pengelolaan Data dan Informasi	50.000.000
994	Layanan Perkantoran		19.523.579.000
	001	Gaji dan Tunjangan	16.830.137.000
	002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	2.693.442.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		288.900.000
	053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	288.900.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		300.000.000
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan		300.000.000
	051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	300.000.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		90.000.000
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		15.000.000
	051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	15.000.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		15.000.000
	052	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	15.000.000
955	Layanan Manajemen Keuangan		30.000.000
	051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	30.000.000
961	Layanan Reformasi Kinerja		15.000.000
	051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/ SPIP	15.000.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		15.000.000
	051	Penyelenggaraan Kearsipan	15.000.000
TOTAL			28.379.646.000

B. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkanlah ukuran untuk menentukan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran tersebut melalui penetapan indikator kinerja. Berikut ini indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2026.

Tabel 3.4 Perjanjian Kinerja TA 2026

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,86
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	650
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	96,50
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	28,57
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4.400
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	4,50
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	40,00
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	83,75
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	80,00
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,05
SK.5	Tercapainya	1	Rekomendasi hasil pengawasan	Persen	50,00

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
	pengawasan internal yang efektif dan efisien		internal telah ditindaklanjuti oleh Satker		
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	88,10
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,00
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	59,07

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2026 disusun mengacu pada sasaran dan program yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2025-2029. Penyusunan Renkin ini adalah merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima dari program lima tahun yang akan ditetapkan dalam Renstra Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2025 - 2029. Rencana rincian kegiatan dan keluaran yang ingin dilaksanakan diarahkan guna meningkatkan daya saing industri kulit, karet dan plastik.

Dengan demikian Renkin ini merupakan bentuk komitmen penuh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik dalam rencana mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2026 ini.

L A M P I R A N

FORMULIR RENCANA KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik
Tahun Anggaran : 2026

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,86
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	650
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	96,50
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	28,57
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4.400
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	4,50
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	40,00
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	83,75
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	80,00
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,05
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	50,00
		2	Nilai minimal hasil pengawasan	Nilai	88,10

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
			kearsipan internal (Unit Kearsipan)		
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,00
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	59,07

Yogyakarta, Januari 2025

Kepala,



Hagung Eko Pawoko

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik									24,771614	27,311085	29,334004	31,458714	34,105395		
IKP 4.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.85	3.86	3.87	3.88	3.88	3.89						Set, BBSPJI, BSPJI
IKP 4.2		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri	288	400	450	460	470	480						Set, BBSPJI, BSPJI
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional														
IKK 6.1.2		Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	96.00	96.50	96.60	96.70	96.80	97.00	0,025431	0,025431	0,025431	0,025431	0,025431	BBSPJI, BSPJI
	a	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis								0,025431	0,025431	0,025431	0,025431	0,025431	
IKK 6.1.3		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	35	40	45	46	47	0,099725	0,099725	0,099725	0,099725	0,099725	BBSPJI, BSPJI
	a	Diseminasi								0,059725	0,059725	0,059725	0,059725	0,059725	
	b	Pameran								0,040000	0,04	0,04	0,04	0,04	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri														
IKK 6.2.1		Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	5.79	5.80	6.00	6.20	6.40	6.50	2,141559	2,355715	2,591286	2,850415	3,135457	BBSPJI, BSPJI
	a	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian								0,421700	0,46387	0,510257	0,5612827	0,61741097	
	b	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi								0,157700	0,17347	0,190817	0,2098987	0,23088857	
	c	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi								0,833779	0,9171569	1,00887259	1,109759849	1,220735834	
	d	Jasa pelayanan sertifikasi profesi								0,040000	0,044	0,0484	0,05324	0,058564	
	e	Jasa pelayanan audit teknologi								0,040000	0,044	0,0484	0,05324	0,058564	
	f	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri								0,170566	0,1876226	0,20638486	0,227023346	0,249725681	
	g	Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen								0,098920	0,108812	0,1196932	0,13166252	0,144828772	
	h	Jasa pelayanan inspeksi teknis								0,053780	0,059158	0,0650738	0,07158118	0,078739298	
	i	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca								0,040590	0,044649	0,0491139	0,05402529	0,059427819	
	j	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi								0,030000	0,033	0,0363	0,03993	0,043923	
	k	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal								0,199800	0,21978	0,241758	0,2659338	0,29252718	
	l	Miniplant karet								0,028533	0,0313863	0,03452493	0,037977423	0,041775165	
	m	Miniplant kulit								0,026191	0,0288101	0,03169111	0,034860221	0,038346243	
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	0,528645	0,5815095	0,63966045	0,703626495	0,773989145	BBSPJI, BSPJI
	a	Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji								0,066060	0,072666	0,0799326	0,08792586	0,096718446	
	b	Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi								0,077300	0,08503	0,093533	0,1028863	0,11317493	
	c	Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi								0,180000	0,198	0,2178	0,23958	0,263538	
	d	Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis								0,053380	0,058718	0,0645898	0,07104878	0,078153658	
	e	Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca								0,042050	0,046255	0,0508805	0,05596855	0,061565405	
	f	Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi								0,037605	0,0413655	0,04550205	0,050052255	0,055057481	
	g	Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal								0,072250	0,079475	0,0874225	0,09616475	0,105781225	
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Nilai	10.00	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	5,300000	6,0000000	6,0000000	5,9000000	6,1000000	BBSPJI, BSPJI
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor								5,300000	5,5000000	5,7000000	5,9000000	6,1000000	
		Pengadaan Renovasi Gedung dan Bangunan								0,000000	0,5000000	0,3000000	0,0000000	0,0000000	
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	22.00	22.50	22.75	23.00	23.50	23.75	15,674509	17,241960	18,966156	20,862771	22,949049	BBSPJI, BSPJI
		Gaji dan Tunjangan								15,674509	17,2419599	18,96615589	20,86277148	22,94904863	
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional														
IKK 6.3.1		Persentase sumber daya manusia yang ditingkatkan (<i>upskilling</i>)	%	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	0,230000	0,235000	0,240000	0,245000	0,250000	BBSPJI, BSPJI
		Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM								0,230000	0,235	0,2400000	0,2450000	0,2500000	
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik														
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	0.00	7.70	15.40	23.10	30.80	38.50	0,022025	0,022025	0,022025	0,022025	0,022025	BBSPJI, BSPJI
		Pengelolaan Data dan Informasi								0,022025	0,022025	0,022025	0,022025	0,022025	

Satuan Kerja	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Terkait
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.4.2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.70	3.75	3.76	3.77	3.78	3.8	0,659720	0,65972	0,65972	0,65972	0,65972	BBSPJI, BSPJI
	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan								0,300000	0,300000	0,300000	0,300000	0,300000	
	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran								0,359720	0,359720	0,359720	0,359720	0,359720	
SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	Set, BBSPJI, BSPJI
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/ SPIP								0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi													
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	81.95	82.00	82.10	82.20	82.30	82.40	0,045000	0,045000	0,045000	0,045000	0,045000	BBSPJI, BSPJI
	Penyusunan rencana program dan anggaran								0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi								0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	
	Penyelenggaraan kedisiplinan								0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	
IKK 6.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	99	94	95	95	96	96	0,030000	0,030000	0,030000	0,030000	0,030000	BBSPJI, BSPJI